

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

2024

Volume 15, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 2024

ISBN :
Katalog BPS : 4102004
No. Publikasi : 12180.2428
Ukuran Buku : 21,5 cm x 28,0 cm
Jumlah Halaman : xii + 54 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

TIM PENYUSUN

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

2024

Penanggung Jawab Umum

Marine Sohadi Angkat, S.Si, M.Si

Koordinator

Penanggung Jawab Teknis

Hendra P. Tondang, S.ST, M.M

Editor

Hendra P. Tondang, S.ST, M.M

Penulis

Rina Ariyanti Siregar, SE

Muhammad Ari Tantowi, S.Stat

Infografis

Muinah, S.Si

Cover Design

Iwan Andi Susanto, S.Si, M.Si

<https://serdangbedagaikab.bps.go.id>

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai telah dapat menyelesaikan penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu publikasi yang direncanakan akan terbit secara rutin tahunan.

Publikasi ini menyajikan indikator-indikator yang menggambarkan kondisi kesejahteraan rakyat yang mencakup aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan, pola konsumsi, kemiskinan, pembangunan manusia, ketenagakerjaan, dan perumahan. Sumber data yang digunakan adalah data hasil pengolahan Susenas, Sakernas, serta data sekunder dari dinas terkait.

Publikasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai aspek kesejahteraan rakyat di Kabupaten Serdang Bedagai sehingga dapat menjadi dasar dan acuan untuk menentukan arah kebijakan serta sebagai alat penilaian dan pemantauan terhadap pencapaian program pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Serdang Bedagai,

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pemikirannya sehingga publikasi ini dapat terwujud. Akhirnya semua kritik dan saran, sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang.

Sei Rampah, Desember 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Serdang Bedagai

Marine Sohadi Angkat

Daftar Isi

v	Kata Pengantar
vii	Daftar Isi
ix	Daftar Tabel
xi	Daftar Gambar

Pendahuluan

1	3	Latar Belakang
	3	Tujuan
	4	Sumber Data
	4	Sistematika Penyajian

Metodologi

2	7	Kependudukan
	8	Kesehatan
	8	Pendidikan
	9	Ketenagakerjaan
	10	Taraf dan Pola Konsumsi
10	Perumahan	

Kependudukan

3	16	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur
----------	----	---

Kesehatan

4	21	Angka Kesakitan (<i>Morbidity Rate</i>)
	23	Penolong Kelahiran

Pendidikan

5	27	Angka Partisipasi Sekolah
	30	Angka partisipasi Murni
	31	Angka Buta Huruf

6

Ketenagakerjaan

- 36 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
- 37 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

7

Taraf dan Pola Konsumsi

- 41 Pengeluaran Rumahtangga

8

Perumahan

- 46 Kondisi Rumah Tinggal
- 47 Fasilitas Rumah Tinggal

9

Kemiskinan

- 53 Perkembangan Penduduk Miskin

<https://serangbedagaikab.bps.go.id>

Daftar Tabel

3	16	Tabel 3.1.	Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (10 tahunan) dan Jenis Kelamin Kabupaten Serdang Bedagai, 2024
	17	Tabel 3.2	Persentase Penduduk Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2024
4	22	Tabel 4.1.	Angka Kesakitan dan Persentase Penduduk di Kabupaten Serdang Bedagai yang Berobat Jalan, 2024
5	31	Tabel 5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Jenis Kelamin, 2023
	31	Tabel 5.2.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Buta Huruf Menurut Kelompok Kepandaian Membaca dan Menulis, dan Jenis Kelamin, 2024
6	36	Tabel 6.1	Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2022-2024
7	42	Tabel 7.1	Pengeluaran/Kapita/Bulan dan Persentase Pengeluaran/Kapita/Bulan Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai, 2023-2024
8	47	Tabel 8.1.	Kondisi Fasilitas Rumah di Kabupaten Serdang Bedagai, 2024
	49	Tabel 8.2.	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama yang Dignakan Untuk Memasak, Mandi, Cuci, dll di Kabupaten Serdang Bedagai, 2024

9

54 Tabel 9.1. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai, 2023-2024

<https://serdangbedagaikab.bps.go.id>

Daftar Gambar

- 4** 24 Gambar 4.1. Persentase Perempuan 15-49 Tahun Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB, 2024
- 5** 29 Gambar 5.1. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai, 2019-2023
- 6** 37 Gambar 6.1. Perkembangan TPT Kabupaten Serdang Bedagai 2020-2024
- 8** 46 Gambar 8.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, 2024
- 8** 48 Gambar 8.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Serdang Bedagai, 2024
- 9** 54 Gambar 9.1. Trend Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Serdang Bedagai, 2020-2024



1

PENDAHULUAN



Latar Belakang



Tujuan



Sumber Data



Sistematika
Penyajian



Pendahuluan 1

Latar Belakang

Pembangunan bangsa merupakan komitmen seluruh Bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara eksplisit pembangunan bangsa telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, politik dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan merupakan komitmen seluruh bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Perencanaan, implementasi dan evaluasi hasil pembangunan, akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan data dan informasi statistik yang baik. Berdasarkan data dan informasi yang dikemas melalui suatu indikator makro, perencanaan pembangunan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berlandaskan pola pikir demikian, diperlukan gambaran mengenai kondisi lapangan mengenai indikator kesejahteraan rakyat untuk melihat berbagai indikator keluaran pembangunan.

Tujuan

Penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi setiap aspek kesejahteraan rakyat di Kabupaten Serdang Bedagai. Indikator ini dapat dijadikan sebagai kompas yang tepat untuk memonitor pencapaian kesejahteraan rakyat.

Melalui analisis Indikator Kesejahteraan Rakyat, perencana dan pelaksana maupun pengamat mendapatkan input mengenai kondisi berbagai dimensi kehidupan yang ada sebagai hasil dan target pembangunan di masa mendatang. Selanjutnya, rencana maupun kebijakan yang disusun diharapkan akan semakin efektif dan efisien, utamanya untuk melaksanakan suatu aksi nyata terhadap suatu kondisi berdasarkan indikator-indikator yang ada. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyusunan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan.

Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data primer Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari sensus dan survei, yaitu Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan kerja Nasional (Sakernas) dan survei lainnya yang telah dilaksanakan.

Sistematika Penyajian

Penyajian data dan analisis dalam dokumen ini dikelompokkan ke dalam sembilan bagian, yaitu:

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data dan sistematika penyajian publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Serdang Bedagai 2024.

Bagian kedua berisi penjelasan teknis yang berisi konsep definisi yang digunakan. Selanjutnya, penyajian aspek kependudukan yang mencakup jumlah/pertumbuhan penduduk dan kepadatan/penyebaran penduduk disajikan pada bagian ketiga. Bagian keempat publikasi ini memaparkan kondisi kesehatan yang mencakup status kesehatan penduduk dan indikator makro kesehatan lainnya, kemudian dilanjutkan pembahasan kondisi pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai dari sisi kualitas pendidikan penduduk pada bagian lima. Aspek ketenagakerjaan dibahas pada bagian enam. Aspek taraf dan pola konsumsi serta perumahan akan dibahas pada bagian tujuh dan delapan. Pembahasan ditutup dengan penyajian Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Serdang Bedagai 2024 pada aspek kemiskinan yaitu pada bagian sembilan.

METODOLOGI

2

Kependudukan



Pendidikan



Kesehatan



Tarif dan Pola Konsumsi



Perumahan



Kemiskinan



Ketenagakerjaan



Kependudukan

Tipe daerah, penentuan suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan berdasarkan indikator komposit (indikator gabungan) yang terdiri dari: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga tani, dan jumlah fasilitas perkotaan.

Variabel kepadatan penduduk mempunyai skor antara 1-8, nilai satu adalah desa dengan kepadatan kurang dari 500 orang per km², nilai dua adalah desa dengan kepadatan antara 500-1.249 orang per km², dan seterusnya sampai dengan nilai delapan yaitu desa dengan kepadatan lebih besar atau sama dengan 8.500 orang per km².

Skor persentase rumah tangga pertanian berkisar antara 1-8. Nilai satu jika desa tersebut memiliki 70 persen atau lebih rumah tangga pertanian, nilai dua jika 50-69,99 persen, dan seterusnya sampai dengan 8, jika desa mempunyai 5 persen rumah tangga pertanian atau kurang.

Skor untuk jenis fasilitas perkotaan adalah 1 dan 0. Desa-desa yang tidak memiliki fasilitas perkotaan namun jaraknya masih relatif dekat atau mudah mencapainya maka desa tersebut dianggap setara dengan desa yang memiliki fasilitas dan diberi skor 1.

Jumlah nilai dari ketiga variabel tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Desa dengan nilai gabungan mencapai 10 atau lebih digolongkan sebagai desa perkotaan sedangkan desa dengan skor maksimum 9 dikategorikan sebagai perdesaan.

Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi.

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Peserta keluarga berencana (akseptor) adalah orang yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi.

Akseptor aktif adalah orang yang pada saat ini memakai metode kontrasepsi untuk penjarangan kehamilan

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun.

Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau lainnya. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Konsultasi adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk membicarakan masalah kesehatan, termasuk konsultasi KB dan konsultasi ke dokter.

Rawat jalan atau berobat jalan adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien, membeli obat atau melakukan pengobatan sendiri. Rawat inap adalah kegiatan atau upaya responden yang mengalami keluhan kesehatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan dan harus menginap.

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir pada suatu daerah.

Pendidikan

Sekolah adalah kegiatan belajar di sekolah formal dan non formal (Paket A, B, dan C) mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.

Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah bersekolah tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

Tamat sekolah adalah menyelesaikan pendidikan pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan yang pernah diikuti (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diikuti oleh seseorang yang masih sekolah.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.

Dapat membaca dan menulis adalah mereka yang dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan sesuatu huruf. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Ketenagakerjaan

Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun untuk sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja bebas profesional seperti dukun dan dalang). Disamping itu termasuk pula dalam pengangguran yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan/usaha tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, sudah diterima kerja namun belum mulai bekerja dan juga mereka yang sudah merasa putus asa dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja dan mencari kerja.

Kegiatan yang terbanyak dilakukan adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibanding dengan kegiatan lainnya.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara berturut-turut dan tidak terputus dalam satu minggu, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi.

Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena suatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan mogok.

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja.

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha (sebagai pengusaha), buruh/karyawan, atau pekerja keluarga tidak dibayar.

Jam kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).

Penduduk yang menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan termasuk menunggu pekerjaan bagi yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

Taraf dan Pola Konsumsi

Konsumsi/pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk kebutuhan (konsumsi) semua anggota rumah tangga. Secara umum pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan (pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau) dan bukan makanan (pengeluaran untuk perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak dan pesta)

Konsumsi rata-rata per kapita setahun, diperhitungkan dari konsumsi rata-rata per kapita dalam seminggu dikalikan dengan $30/7 \times 12$.

Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan, mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dikonsumsi di luar rumah, termasuk minuman, tembakau dan sirih dalam jangka waktu sebulan.

Perumahan

Bangunan fisik adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.

Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri.

Luas lantai adalah luas lantai dari bangunan tempat tinggal atau jumlah dari setiap bagian tempat tinggal yang ditempati oleh anggota rumah tangga dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.

Atap adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami dibawahnya dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

Sumber Air Minum Bersih adalah sumber air minum yang berasal dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 m.

Sumber Air Minum Layak adalah sumber air minum yang berasal dari leding, air hujan, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 m.

Akses air layak adalah sumber air minumnya terdiri leding, air hujan, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung, serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m] dan sumber air minum kemasan/air isi ulang dimana sumber air cuci/masak/mandi/dll menggunakan (sumur bor/pompa, sumur terlindung, serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m.

Air leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).

Air sumur/mata air terlindung adalah bila lingkaran mulut sumur/mata air tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut/perigi.

KEPENDUDUKAN

25,71%



0 - 14 Tahun

67,01%



15 - 64 Tahun

7,28%



65+ Tahun

Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan 10 Tahun ke atas

34,70%

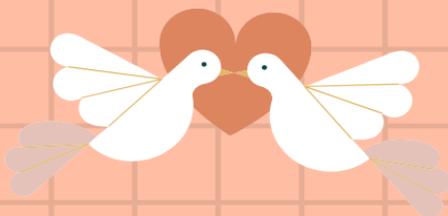
Belum Kawin

57,79%

Kawin

7,51%

Cerai



Kependudukan

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

Untuk itu aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam angka meningkatkan kesejahteraan penduduk seperti: arus migrasi, angka kelahiran dan kematian. Ketiga komponen ini turut serta dalam perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan politik serta pertahanan.

Data kependudukan sangat dibutuhkan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dari data kependudukan dapat dibuat berbagai perencanaan kebutuhan fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, dan fasilitas lainnya.

Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Tabel 3.1 Persentase penduduk menurut kelompok umur (10 tahunan) dan jenis kelamin, 2024

		Jenis kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
Kelompok Umur	0-9	17.15	16.43	16.79
	10-19	17.87	16.96	17.42
	20-29	15.47	14.56	15.02
	30-39	14.10	14.33	14.21
	40-49	13.67	14.32	13.99
	50-59	11.34	11.60	11.47
	60+	10.41	11.81	11.10
Total		100.00	100.00	100.00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2024

Pada tabel 3.1. ditampilkan persentase penduduk Kabupaten Serdang Bedagai menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2024. Penduduk dengan usia 10-59 tahun masih mendominasi komposisi penduduk Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2024, yaitu sebesar 72,11 persen. Sedangkan untuk usia 0-9 tahun dan 60 tahun keatas masing-masing sebesar 16,79 persen dan 11,10 persen.

Masalah kependudukan lainnya yang cukup serius adalah masih timpangnya persentase penduduk antar kelompok umur, sehingga beban tanggungan penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) masih cukup besar. Oleh karena itu, hal harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Berdasarkan hasil Susenas 2024, diperoleh persentase penduduk usia produktif (15-64) sebesar 67,01 persen yang berarti setiap seratus orang ada sekitar 67 orang usia produktif. Untuk persentase penduduk yang menjadi beban tanggungan anak bagi usia produktif yaitu dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun sebesar 32,96 persen atau dari 100 penduduk ada sekitar 33 orang yang menjadi beban tanggungan usia produktif .

Tabel 3.2.
Persentase penduduk menurut karakteristik dan kelompok umur, 2024

		Kelompok Umur		
		0-14	15-64	65+
Jenis kelamin	Laki-laki	26,11	67,17	6,72
	Perempuan	25,31	66,84	7,85
Total		25,71	67,01	7,28

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2024

<https://serdangbedagaikab.bps.go.id>



4

KESEHATAN

Angka Kesakitan

Dari 100 orang terdapat 15 - 16 orang yang mengalami keluhan kesehatan

15,08

Laki-laki
14,56 %



Perempuan
15,52 %



26,20 %

Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Pernah Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan



98,70 %

perempuan berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin di Kabupaten Serdang Bedagai sudah lebih banyak melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan,

Sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seorang dalam melakukan aktivitasnya.

Bangsa yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Oleh sebab itu kesehatan menjadi salah satu aspek kesejahteraan dan menjadi fokus utama pembangunan manusia. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata karena memang salah satu hak dasar rakyat adalah mendapat pelayanan kesehatan.

Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta peningkatan pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat serta sarana penunjangnya terus dilakukan oleh Pemerintah, seperti Puskesmas, Posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang digiatkan pemerintah diharapkan dapat berakselerasi positif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di antaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

Angka kesakitan (Morbidity Rate)

Tingkat kesakitan/morbiditas didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam sebulan yang lalu atau mengalami sakit. Tingkat kesakitan ini selain secara umum, dapat juga keluhan menurut jenis penyakit.

Pada tahun 2024 angka kesakitan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 15,08 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, umumnya pada tahun 2024 perempuan lebih banyak menderita sakit yaitu sebesar 15,52 persen sedangkan laki-laki sebesar 14,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat morbiditas di Kabupaten Serdang Bedagai yang berfluktuatif setiap tahunnya. Tingkat morbiditas pada tahun 2024 meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2023 (14,95 persen).

Berbagai upaya dilakukan penduduk untuk menjaga kesehatan, baik secara mandiri maupun oleh keluarganya yang masih sehat. Upaya menjaga kesehatan yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan berobat sendiri, berobat jalan, maupun rawat inap. Berobat sendiri merupakan upaya mengobati penyakit atas inisiatif sendiri, berdasarkan pengetahuan kesehatan yang dimilikinya secara mandiri. Berobat jalan/ rawat jalan adalah melakukan konsultasi kesehatan kepada tenaga ahli kesehatan yang dipercaya, dengan cara mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern maupun tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Adapun rawat inap adalah proses penyembuhan penyakit yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang mendukung, dibawah pendampingan dan pengawasan petugas kesehatan yang kompeten. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya cara berobat dengan mengobati sendiri sebenarnya tidak direkomendasikan.

Berdasarkan Tabel 4.1. diketahui bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan kemudian berobat jalan untuk mengobati sakitnya dengan menggunakan jaminan kesehatan adalah sebesar 26,20 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, umumnya pada tahun 2024 laki-laki lebih banyak yang berobat jalan menggunakan jaminan kesehatan, yaitu sebesar 27,93 persen sedangkan wanita sebesar 24,57 persen.

Tabel 4.1. Angka Kesakitan dan Persentase Penduduk di Kabupaten Serdang Bedagai yang Rawat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan, 2024

Jenis Kelamin	Angka Kesakitan	Persentase penduduk yang rawat jalan menggunakan jaminan kesehatan
(1)	(2)	(3)
Laki-Laki	14,65	27,93
Perempuan	15,52	24,57
LK + PR	15,08	26,20

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2024

Penolong Kelahiran

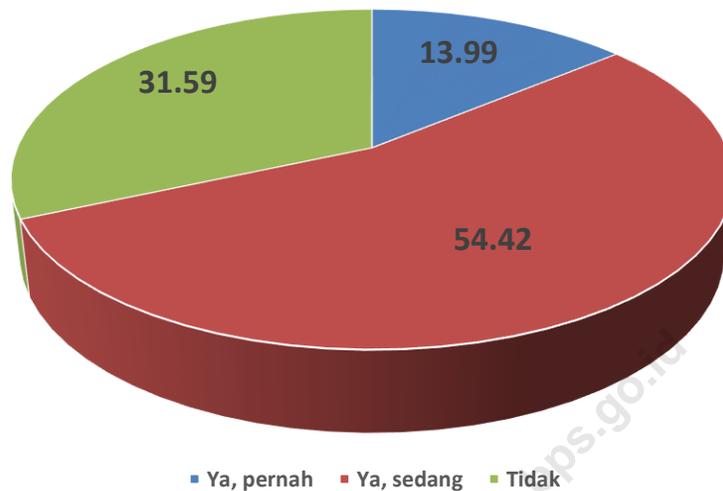
Salah satu unsur yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dan aman jika dibanding ditolong oleh bukan tenaga medis seperti dukun, famili atau lainnya. Penanganan kelahiran bayi yang kurang baik dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi yang dilahirkan seperti pendarahan, kejang-kejang atau situasi yang lebih berbahaya dapat mengakibatkan kematian pada bayi atau si ibu. Pada tahun 2024 perempuan berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin di Kabupaten Serdang Bedagai sudah lebih banyak melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu sebesar 98,70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan kesehatan ibu dan bayi sudah sangat tinggi.

Tabel 4.2. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15–49 Tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam 2 Tahun Terakhir dengan Penolong Persalinan ALH yang Terakhir oleh Tenaga Kesehatan Menurut Karakteristik di Kabupaten Serdang Bedagai, 2024

Karakteristik	Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
(1)	(2)
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	96,83
40 Persen Menengah	100,00
20 Persen Teratas	100,00
Pendidikan Tertinggi	
SD ke bawah	100,00
SMP ke atas	98,59
Serdang Bedagai	98,70

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2024

Gambar 4.1 Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin menurut partisipasi KB, 2024



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2024

Keluarga Berencana

Upaya penurunan tingkat fertilitas di Kabupaten Serdang Bedagai telah dilakukan cukup lama. Penurunan tersebut masih akan terus berlangsung tetapi dengan kemungkinan yang semakin melambat. Selain karena faktor budaya lokal, pengalaman menunjukkan bahwa penurunan tingkat fertilitas juga dipengaruhi oleh meningkatnya faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, selain dikarenakan program KB, penurunan fertilitas juga disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai yang nantinya akan mempengaruhi umur pada saat perkawinan pertama.

Secara umum, tingkat partisipasi perempuan 15-49 tahun pernah kawin terhadap program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2024 cukup tinggi, hal ini dapat dilihat pada gambar 4.1 dimana perempuan 15-49 tahun pernah kawin yang sedang menggunakan KB dan pernah menggunakan KB tahun 2024 telah mencapai 54,42 persen dan 31,59 persen. Sedangkan yang tidak menggunakan KB sebesar 13,99 persen.

5

PENDIDIKAN



SD
20,31%



SMP
24,55%



SMA
40,53%



PERGURUAN
TINGGI
6,71%



7,89%

Tidak Punya Ijazah
SD



Penduduk 15
Tahun ke Atas
Menurut
Pendidikan yang
Ditamatkan

<https://serdangbedagaikab.bps.go.id>

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran.

Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pada program pembangunan pendidikan nasional yang dilakukan saat ini telah pula mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*) dan *Sustainable Development Goals* (MDGs) yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan sosial dan lainnya.

Untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang suatu kemampuan baik itu dari Pemerintah untuk dapat menyediakan sarana yang memadai dan juga ditunjang dengan kemampuan masyarakat, karena sampai saat ini kemampuan pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis bagi warganya masih belum terlaksana secara optimal.

Masih rendahnya kemampuan pemerintah dan masyarakat selalu menjadi kendala dalam dunia pendidikan. Realita ini senantiasa banyak ditemui di sekeliling kita, yaitu banyak sarana pendidikan yang sangat tidak layak dan juga banyak anak-anak usia sekolah seharusnya belajar, namun sudah harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Ditengah keterbatasan inilah pemerintah mencanangkan Program Wajib Belajar Sekolah Dasar enam tahun pada tahun 1984 dan kemudian diikuti dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun mulai tahun 1994. kebijaksanaan lain sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat adalah melalui program di luar pendidikan formal, diantaranya melalui sekolah-sekolah program jarak jauh.

Program atau kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat sekolah. Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan lebih baik dan utamanya tingkat melek huruf terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun).

Angka Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun dan umur 13-15 tahun sebagai pendidikan dasar, 16-18 tahun pada pendidikan menengah. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Pada umumnya, partisipasi pendidikan dasar masih cukup tinggi, dan angka ini akan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator penting dalam pendidikan yang menunjukkan persentase penduduk usia 7-12 tahun yang masih terlibat dalam sistem pendidikan. Adakalanya penduduk usia 7 – 12 tahun belum sama sekali menikmati pendidikan, tetapi ada sebagian kecil dari kelompok mereka yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat SD.

Gambar 5.1. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai, 2019-2023



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2023

Gambar 5.1. menunjukkan angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019-2023, pada setiap kelompok usia terlihat terjadi peningkatan di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Usia 7-12 tahun meningkat dari 98,91 persen pada tahun 2022 menjadi 99,28 persen pada tahun 2023, pada kelompok usia 13-15 tahun meningkat dari 96,06 persen pada tahun 2022 menjadi 96,12 persen pada tahun 2023. Peningkatan juga terjadi pada kelompok umur 16-18 tahun, pada kelompok umur 16-18 tahun meningkat dari 76,93 persen pada tahun 2022 menjadi 78,12 persen pada tahun 2023.

Angka Partisipasi Murni

Dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan, salah satunya adalah keluhan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah di antaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk dewasa.

Selain APS, indikator pendidikan lain adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Informasi yang diperoleh dari APS tidak memperhitungkan anak pada suatu kelompok yang benar-benar bersekolah pada jenjangnya. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang partisipasi sesuai dengan jejang pendidikan, indikator APM memang lebih relevan. APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur dengan jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Tabel 5.1 menunjukkan bagaimana besaran APM di masing-masing jenjang pendidikan. Terlihat disini bahwa seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, maka nilai APM cenderung semakin berkurang. Tahun 2023, capaian APM SD/Sederajat telah mencapai 98,81 persen. Artinya hampir seluruh anak usia 7-12 bersekolah pada jenjang SD. Terlihat pada gambar, bahwa baik laki-laki maupun perempuan telah menikmati bersekolah di jenjang SD.

APM SMP/Sederajat sebesar 75,08 persen memberikan gambaran bahwa hampir 25 dari 100 anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang SMP, bisa masih SD, sudah SMA atau sudah putus sekolah. Capaian APM SMP pada tahun 2023 masih menunjukkan bahwa pendidikan di tingkat SMP belum dirasakan oleh seluruh anak usia 13-15 tahun. APM Kabupaten Serdang Bedagai cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan APM Propinsi Sumatera Utara untuk semua jenjang pendidikan.

Tabel 5.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Jenis Kelamin, 2023

KABUPATEN	APM			
	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Serdang Bedagai	98,81	75,08	71,31	13,78
Propinsi Sumatera Utara	97,95	82,09	68,67	22,06

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2023

Angka Buta Huruf

Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf atau tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Kemampuan membaca dan menulis akan mendorong meningkatnya peran aktif penduduk dalam proses pembangunan. Secara persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum dapat membaca dan menulis di Kabupaten Serdang Bedagai dapat dikatakan rendah. Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024, persentase penduduk yang melek huruf latin sebanyak 99,02 persen.

Satu indikator tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Selanjutnya tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki akan dapat mendorong penduduk untuk berperan lebih aktif dalam proses pembangunan.

Tabel 5.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Melek Huruf Menurut Kelompok Kepandaian Membaca dan Menulis, dan Jenis Kelamin, 2024

KEPANDAIAN MEMBACA DAN MENULIS	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Huruf Latin/Alfabet	99,44	98,60	99,02
Huruf Arab/Lainnya	64,25	65,18	64,72

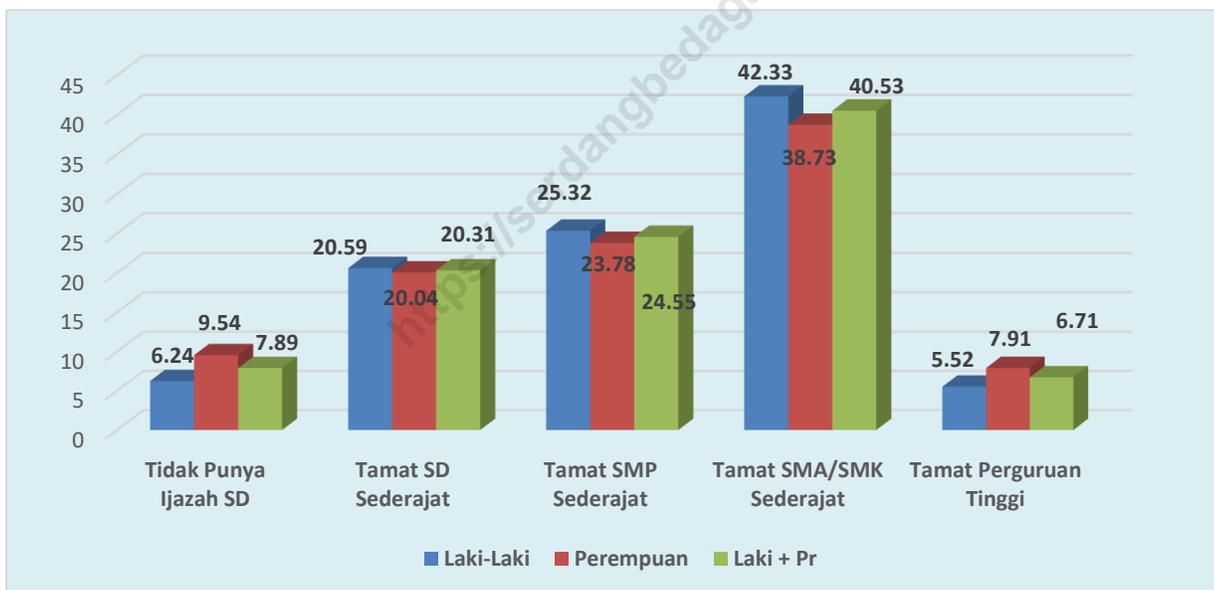
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2024

Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan ditamatkan

Tingkat pendidikan menjadi salah satu tolak ukur untuk menghasilkan penduduk yang berkualitas dan merupakan modal dasar pembangunan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah mempunyai program wajib belajar dua belas tahun. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Pada Gambar 8.2, terlihat persentase tertinggi untuk pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada penduduk usia 15 tahun ke atas adalah jenjang SMA/SMK sederajat yaitu sebesar 40,53 persen, untuk persentase berdasarkan jenis kelamin masing-masing sebesar laki-laki (42,33 persen) dan perempuan (38,73 persen). Untuk persentase terendah adalah pada jenjang pendidikan yang ditamatkan perguruan tinggi 6,71 persen, kemudian untuk yang tidak memiliki ijazah SD sebesar 7,89 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara persentase perempuan dan laki-laki yang menamatkan jenjang pendidikan pada setiap jenjang pendidikan tersebut.

Gambar 8.2. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2024



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2024



KETENAGAKERJAAN

67,75 %



TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)
BPS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2024



4,88 %

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
BPS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2024

Ketenagakerjaan

Secara teori, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Pada analisis ketenagakerjaan ini digunakan batasan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*economically active*) didefinisikan bagian dari tenaga kerja yang benar-benar siap bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Penduduk yang siap bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan pengangguran. Tenaga kerja yang termasuk kedalam bukan angkatan kerja (*uneconomically active*) adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bersekolah, mengurus rumah tangga, penerima pendapatan (*pensiunan*) dan lain-lain.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Serdang Bedagai diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat di samping pertambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja.

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Serdang Bedagai dalam bagian ini akan disajikan kondisi ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), dan tingkat pengangguran pada tahun 2024. Selain itu, disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, serta jam kerja.

Tabel 6.1. Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2022-2024

Kegiatan	Tahun		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan kerja	308.235	337.622	344.094
- Bekerja	292.872	320.835	327.292
- Pengangguran	15.363	16.787	16.802
Bukan Angkatan kerja	147.830	161.447	163.805
Jumlah Penduduk Usia Kerja	456.065	499.069	507.899
T P A K (%)	67,59	67,65	67,75
TPT (%)	4,98	4,97	4,88

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus, 2022 - 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) digolongkan sebagai:

- (i) angkatan kerja, bila mereka bekerja atau mencari pekerjaan, dan
- (ii) bukan angkatan kerja, bila mereka bersekolah, mengurus rumahtangga, dan lainnya.

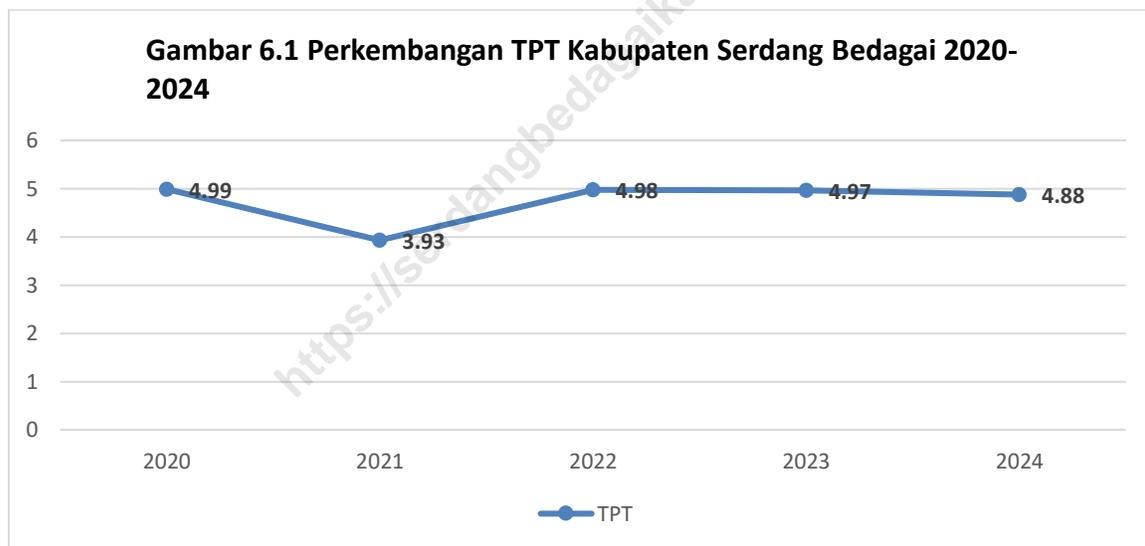
Pada tabel 6.1 dapat disimpulkan bahwa tahun 2024, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Serdang Bedagai adalah 507.899 orang yang terdiri dari 344.094 angkatan kerja dan sebanyak 163.805 orang termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja disuatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa TPAK di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2024 sebesar 67,75 persen, artinya bahwa pada tahun 2024 sebanyak 67,65 persen penduduk usia kerja di Kabupaten Serdang Bedagai siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu ukuran pengangguran adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Pengangguran terbuka juga merupakan masalah yang dianggap paling serius untuk diatasi. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 4,88 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 tersebut menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Serdang Bedagai cukup baik.

Hal ini dapat dipahami bahwa di Kabupaten Serdang Bedagai pada umumnya merupakan daerah pertanian, dan tidak sulit untuk bekerja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Berbeda dengan di perkotaan dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, penduduk usia kerja umumnya lebih selektif untuk mencari pekerjaan, selain karena sudah terbatasnya lahan pertanian.



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus, 2020 - 2024

Dari gambar 6.1 dapat dilihat perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Serdang Bedagai (2020-2024). Penurunan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 3,93 persen. Secara keseluruhan TPT mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Berbagai strategi yang dilakukan pemerintah pasca pandemi *covid-19*, berhasil menekan menurunkan angka pengangguran. Hal ini terlihat dari gambar 6.1. terjadi penurunan TPT pada tahun 2021 sampai 2024. Pada tahun 2024 TPT di Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 4,88 persen, angka ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2023 (4,97 persen).

<https://serdangbedagaikab.bps.go.id>



TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pengeluaran Perkapita di Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2024

Rp. 1.116.248,-



Untuk Makanan
Rp. 641.609,-

Bukan Makanan
Rp. 474.640,-

Taraf dan Pola Konsumsi

Pengeluaran Rumah Tangga

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan pada tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga, yang dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, di negara yang relatif sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga. Perubahan angka persentase tersebut dalam setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf hidup rumah tangga.

Salah satu informasi dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran per kapita pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.116.248,-, terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp. 641.609,- dan untuk pengeluaran bukan makanan Rp. 474.640,-. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran digunakan untuk konsumsi makanan, berarti sebagian besar dari penduduk masih memprioritaskan pemenuhan untuk kebutuhan primer (makanan), yaitu sebesar 57,48 persen.

Tabel 7.1. Pengeluaran/Kapita/Bulan dan Persentase Pengeluaran/Kapita/Bulan Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai, 2023-2024

TAHUN	PENGELUARAN/KAPITA/BULAN			% PENGELUARAN/KAPITA/BULAN		
	Makanan	Bukan Makanan	JUMLAH	Makanan	Bukan Makanan	JUMLAH
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2023	642.834	469.344	1.112.178	57,80	42,20	100,00
2024	641.609	474.640	1.116.248	57,48	42,52	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2024



8

PERUMAHAN



96,06 %

Rumah tangga di
Kabupaten Serdang
Bedagai yang memiliki
fasilitas tempat buang
air besar sendiri

76,03 %

Rumah tangga di
Kabupaten Serdang
Bedagai mendiami
rumah milik sendiri



Perumahan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 yang mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman menjadi tugas bagi negara yang penyelenggaraan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

Manusia dan lingkungannya baik fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik dapat berupa alam sekitar yang alamiah dan juga buatan. Untuk melindungi diri dari kondisi alam, manusia berusaha membuat tempat perlindungan yang dikenal dengan rumah atau tempat tinggal. Oleh sebab itu selain sandang dan pangan, papan (perumahan) juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Sampai saat ini permintaan rumah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Di pihak lain, terbatasnya lahan untuk permukiman dan penawaran perumahan hanya dapat dijangkau oleh golongan masyarakat tertentu. Hal ini merupakan kendala bagi sebagian besar masyarakat golongan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan perumahannya sehingga menyebabkan banyak rumah tangga menempati rumah yang kurang layak, baik dipandang dari segi kesehatan maupun kepadatan penghuninya.

Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, yaitu ditentukan oleh fasilitas rumah yang ada. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut di antaranya terlihat dari luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan lainnya. Demikian pula letaknya yang mudah untuk menjangkau fasilitas lingkungan seperti sekolah, tempat berobat, pasar dan tempat rekreasi. Dengan kondisi semacam ini, keadaan perumahan beserta lingkungannya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kondisi Rumah

Salah satu hal yang dapat dijadikan gambaran kondisi kesejahteraan penduduk dari sisi perumahan adalah status kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator perumahan yang menunjukkan penguasaan rumah tangga terhadap rumah yang ditempatinya. Dalam beberapa analisis juga dijadikan sebagai pendekatan indikator *backlog* perumahan.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2024

Berdasarkan informasi pada gambar 8.1, mayoritas rumah tangga di Kabupaten Serdang Bedagai yakni mendiami rumah milik sendiri yaitu sebesar 76,03 persen. Status penguasaan tempat tinggal milik sendiri dapat dikatakan rumah tangga tersebut telah mampu memenuhi tempat tinggal yang terjamin. Hal ini dikarenakan tempat tinggal milik sendiri cenderung lebih permanen dalam jangka panjang dibandingkan yang tidak menempati rumah milik sendiri..

Fasilitas Rumah Tinggal

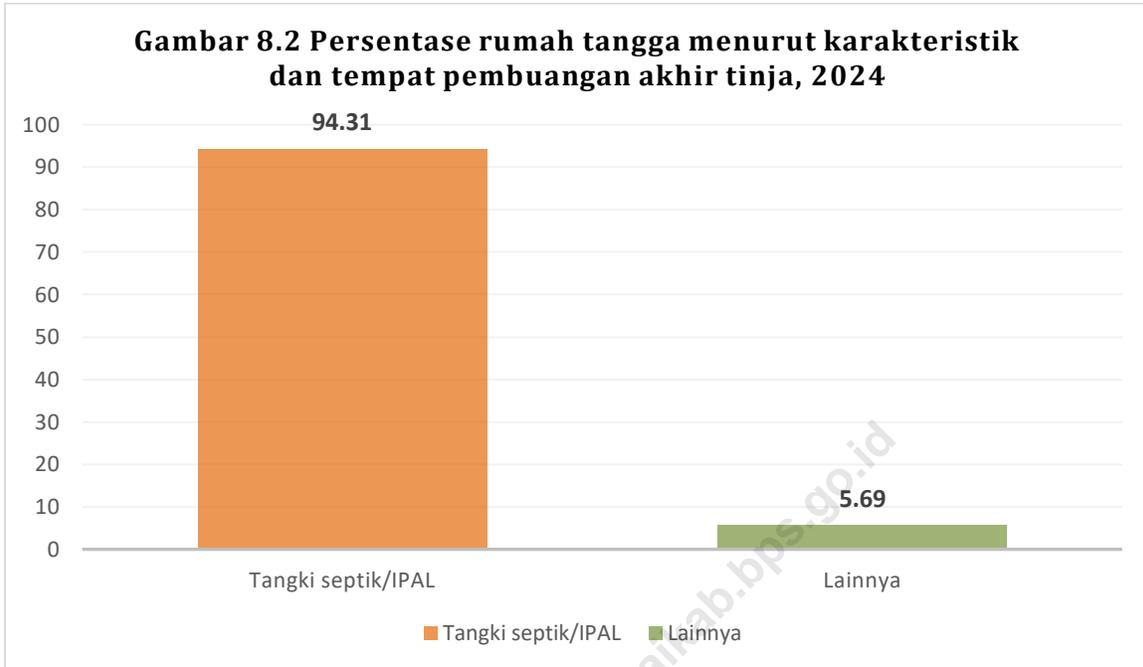
Rumah yang layak tidak hanya dilihat dari kondisinya tapi juga dari ketersediaan fasilitas penunjang perumahan yang utama di antaranya adalah fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB). Fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan oleh rumah tangga dapat mencerminkan tingkat kesehatan rumah beserta lingkungannya. Pada tahun 2024 fasilitas tempat buang air besar sebahagian besar rumah tangga di Kabupaten Serdang Bedagai adalah digunakan oleh ART sendiri (96,06 %) dengan kloset leher angsa (99,35 %).

Tabel 8.1. Kondisi Fasilitas Tempat Buang air Besar di Kabupaten Serdang Bedagai, 2024

Uraian (1)	Persentase (4)
1. Rumah tangga yang menggunakan kloset leher angsa (%)	99,35
2. Rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri (%)	96,06

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2024

Rumah tangga cenderung berupaya agar tempat tinggalnya memiliki tempat buang air besar sendiri, dengan alasan kebersihannya lebih terjaga. Tersedianya tempat buang air besar sendiri yang memenuhi syarat kesehatan, akan menjauhkan rumah tangga dari penyebaran penyakit. Oleh karena itu tempat penampungan akhir juga sangat penting bagi kesehatan lingkungan.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2024

Tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan adalah yang menggunakan tangki septik sehingga limbah manusia tersebut tidak mencemari lingkungan, terutama sumber air minum (pada sumur pompa atau sumur). Pada tahun 2024 tangki septik/IPAL merupakan pilihan terbanyak rumah tangga di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu sebesar 94,31 persen. Namun masih terdapat sekitar 5,69 persen rumah tangga dengan tempat penampungan akhir di tempat lainnya seperti lubang tanah, kolam, sawah, sungai/danau/laut.

Tabel 8.2. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama yang Dignakan Untuk Memasak, Mandi, Cuci, dll di Kabupaten Serdang Bedagai, 2024

Sumber Air Minum	Persentase
(1)	(2)
1. Leding	1,11
2. Sumur bor/pompa/sumur terlindung/mata air terlindung/ Air hujan	95,95
3. Lainnya	2,93

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2024

Rumah tangga dikategorikan memiliki akses terhadap air minum bersih apabila sumber untuk air minum berasal dari air kemasan, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan jarak ≥ 10 meter dari penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat.

Sebagian kecil rumah tangga di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2024 telah menggunakan sumber air leding untuk memasak, mandi, cuci, dll yaitu mencapai 1,11 persen. Sedangkan penggunaan sumur bor/pompa/sumur terlindung/mata air terlindung/air hujan masih cukup tinggi yaitu sebesar 95,95 persen, hal ini wajar karena pada sebagian daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah pedesaan yang memiliki banyak sumber mata air, dan juga tidak/belum tersedianya fasilitas air leding.

<https://serdangbedagaikab.bps.go.id>



9

KEMISKINAN

6,97%

PENDUDUK MISKIN DI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2024



GARIS KEMISKINAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 2024

Rp. 518.209,-



<https://serdangbedagaikab.bps.go.id>

Kemiskinan

Perkembangan Penduduk Miskin

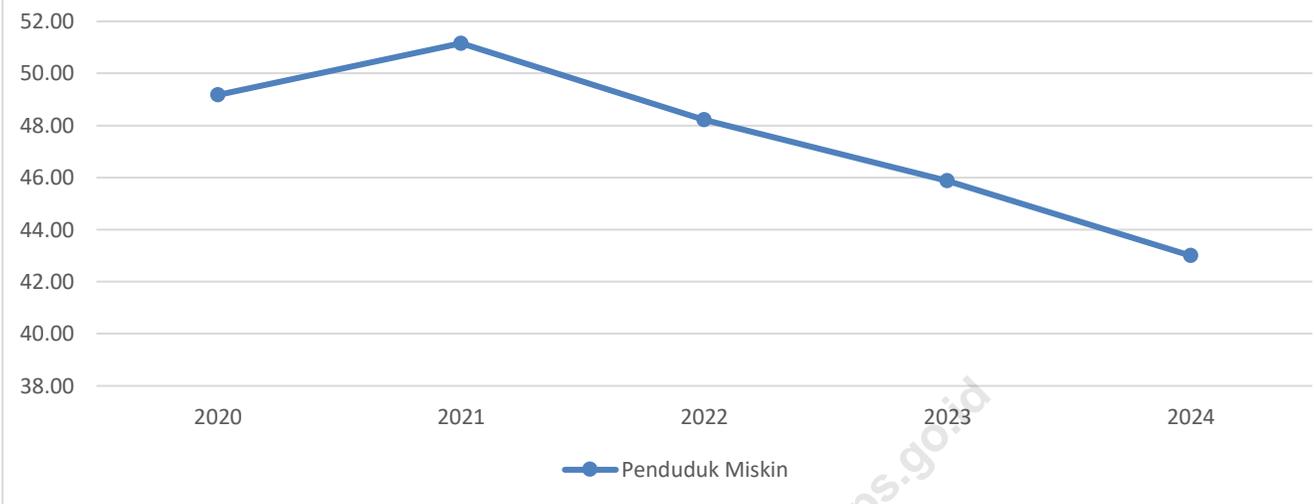
Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, di mana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan ini membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan minimal non-makanan yang harus dipenuhi. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi sebesar 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan. Patokan 2.100 kilo kalori ditentukan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang menyatakan hidup sehat rata-rata setiap orang harus mengkonsumsi makanan minimal setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan pada bulan Maret 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 43,00 ribu jiwa atau sebesar 6,97 persen terhadap total penduduk. Jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada bulan Maret 2023, dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 45,88 ribu jiwa atau sebesar 7,44 persen, terjadi penurunan jumlah 0,44 poin.

Gambar 9.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Serdang Bedagai(000) (Jiwa) 2020-2024



Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2023 – Maret 2024, secara umum Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya (P_2) menunjukkan sedikit peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 0,89 menjadi 1,11. Demikian pula Indeks Keparahannya dari 0,21 menjadi 0,28 pada periode yang sama. Peningkatan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin besar.

Tabel 9.1. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai, 2023-2024

Uraian	2023	2024
(1)	(2)	(3)
1. Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	45,88	43,00
2. Persentase penduduk miskin (P_0)	7,44	6,97
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	0,89	1,11
4. Indeks Keparahannya (P_2)	0,21	0,28
5. Garis Kemiskinan (Rupiah)	503.955	518.209

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2023-2024

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA
MENCERDASKAN BANGSA

<https://serdangbedagikaab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Jl Negara Medan - Tebing Tinggi Kompleks Instansi Vertikal - Sei Rampah 20995
Telp : (0621) 441826, Email : bps1218@bps.go.id, Homepage : serdangbedagikaab.bps.go.id